

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian baik individu ataupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya (Muhtadi, 2009:31). Nawangsari (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Faktor yang dapat pendukung pemberdayaan diantaranya yaitu: (1) adanya akses teknologi, (2) adanya kerja sama pemerintah dan BUMN untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu: (1) kurangnya kesadaran masyarakat, (2) minimnya tenaga kerja yang ada.

Dalam upaya pemberdayaan hal yang penting adalah mengikut sertakan segala potensi yang ada pada masyarakat. Kebutuhan dan potensi ini menjadi pertimbangan utama yang ada dalam kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan bisa didasarkan pada potensi wilayah (alam, sosial, budaya) dalam masyarakat. Pengembangan usaha memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dimiliki menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Dengan cara ini pemberdayaan akan

lebih mudah dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat (Anwas. 2014:131).

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti: a) Peningkatan pengetahuan teknis utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk, b) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jaringan kemitraan, c) Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimalisasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan local, d) Peningkatan aksesstabilitas modal, pasar, informasi e) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat. (Mardikanto, 2017)

Pemberdayaan kini telah menjadi alternatif solusi dalam pengentasan kemiskinan. Akhir-akhir ini banyak perempuan dinilai lebih ulet dan bertanggung jawab. Awalnya perempuan tidak dilibatkan pada pembangunan, namun akhir-akhir ini melalui pemberdayaan perempuan sudah banyak dilibatkan dalam hal pembangunan. Sebenarnya pemberdayaan perempuan ini sudah didengungkan sejak puluhan tahun yang lalu, namun perempuan selalu menjadi pihak yang dinomorduakan. Ketimpangan jenis kelamin dalam partisipasi masih sering terjadi. Selain itu, dalam menikmati sumber daya produktif perempuan juga masih mengalami kesulitan dibandingkan dengan laki-laki. Faktor minimnya partisipasi dan penomorduaan membuat eksistensi perempuan diranah publik kian minim (Edi, 2009: 03).

Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam. Mulai pendidik sampai karir. Tidak dapat dipungkiri, saat ini perempuan banyak yang berperan sebagai laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarga. Dunia kerja yang selama ini dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat penghuni baru yang namanya perempuan yang selama ini selalu diasumsikan menghuni dunia domestik, dunia rumahan (Astuti, 2011: 114). Pendapatan pas-pasan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami), mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam membantu pendapatan ekonomi keluarga. Ardiyati (2018) dalam penelitiannya memaparkan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Persoalan yang dihadapi perempuan dari golongan berpenghasilan rendah pada khususnya, timbul karena ada kaitannya dengan status sebagai perempuan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan melalui proses pembangunan sosial ekonomi (Sajogyo, 2007: 78).

Sasaran aparat pemerintahan di segala tingkat dalam meningkatkan pembangunan sosial ekonomi pedesaan yang juga diperlukan adalah rumah tangga pedesaan meliputi segala kegiatan aggotanya, sumber penghasilan dan berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan desa dengan memberikan kegiatan-kegiatan dalam kelompok seperti pembuatan keterampilan desa. Keterampilan salah satu unsur penting dalam usaha memecahkan masalah kemiskinan di desa. Keterampilan yang dimiliki

perempuan dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha rumah tangga khususnya desa, untuk itu keterampilan perempuan penting dan peran perempuan dalam mengolah ekonomi keluarga dapat mengurangi pengangguran (Sajogyo. 2007: 82).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, saat ini kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 di perkotaan sebesar 6,89 persen. Sementara, tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 13,1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan cenderung lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Data ini menunjukkan penduduk yang ada pada sektor agraris cenderung miskin dibandingkan dengan yang berada di sektor lainnya seperti industri, perdagangan maupun pemerintahan. Data tersebut diinterpretasikan demikian bahwa penduduk perdagangan rata-rata memiliki mata pencaharian bertani. Kondisi ini terjadi karena petani dipedesaan saat ini cenderung hanya memiliki lahan yang sempit, bahkan hanya sebagai petani penggarap atau buruh, akibatnya penghasilan yang diperoleh juga rendah.

Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbagi dalam 18 kecamatan, 26 kelurahan dan 330 desa. Salah satunya adalah Desa Sukorejo yang berada di Kecamatan Sidayu dengan jumlah penduduk perempuan 1.185 jiwa dan laki-laki 1.174 jiwa dari total penduduk di Desa Sukorejo sejumlah 2.361 jiwa. Dimana mayoritas penduduk baik laki-laki maupun perempuan 75 persen bekerja sebagai petani, yang mana pekerjaan itu tidak bisa didapatkan setiap hari, mereka bekerja jika

ada pekerjaan dimusim pertanian saja. Perempuan di Desa Sukorejo saat tidak ada pekerjaan mereka hanya bekerja dirumah melakukan tugas utama sebagai ibu rumah tangga, hal ini menyebabkan para perempuan tidak memiliki waktu untuk meningkatkan pendapatan dan potensi yang dimiliki, keterampilan serta memberdayakan diri. Selain itu, kesadaran untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki sangatlah rendah. sehingga penghasilan yang didapatkan juga masih tergolong rendah.

Menurut Tri (2015) dalam penelitiannya memaparkan pemberdayaan merupakan upaya dalam memberikan penguatan skill (keterampilan) serta kemudahan akses agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih untuk berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Minimnya partisipasi aktif dari perempuan dalam pembangunan, membuat perempuan menjadi termarginalkan. Sehingga perlu adanya pemberdayaan perempuan agar bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui BUMDes, maka dari itu, dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan bisa menjadi wadah dalam menjadi sumber penghasilan dan pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di desa khususnya perempuan, Wijanarko (2012) menyatakan bahwa BUMDes mempunyai peran yang cukup strategis dalam menggerakkan motor perekonomian di pedesaan, BUMDes memiliki dua peran utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial sementara fungsi

sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Peranan BUMDes juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa hasil dari BUMDes dapat dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Mengetahui pentingnya peran BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014, Kabupaten Gresik akhirnya menerbitkan peraturan daerah mengenai BUMDes adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa membuat banyak desa-desa di Kabupaten Gresik mendirikan BUMDes. Salah satu BUMDes yang telah ada dan berkembang adalah BUMDes Podho Joyo, yang didirikan pada tanggal 5 April 2008, BUMDes Podho Joyo didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi masyarakat desa serta mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sukorejo.

Pendirian BUMDes ini awalnya dilandasi dengan adanya peraturan Desa Sukorejo No. 01 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kemudian diperbarui menjadi peraturan Desa Sukorejo No. 03 Tahun 2016.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Sukorejo. Adapun alasan memilih BUMDes Podho Joyo sebagai objek penelitian, karena di Desa ini melalui BUMDes telah banyak prestasi-prestasi yang didapatkan, sehingga dengan adanya prestasi itu mampukah untuk memberdayakan masyarakatnya terkhusus perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Dari fenomena inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui BUMDes Podho Joyo (Studi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui BUMDes Podho Joyo”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggalih dan mendeskripsikan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan melalui BUMDes podho joyo, sehingga mereka tidak hanya menjadi ibu rumah tangga namun dengan adanya pemberdayaan perempuan ini bisa membantu meningkatkan pendapatan atau potensi yang dimiliki.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan khususnya untuk program studi Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan tidak hanya informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi BUMDes dan pemerintah Desa Sukorejo agar dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui BUMDes, sehingga bisa juga membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa.